



# **LAPORAN KEUANGAN PELAKSANAAN APBD**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dan  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN WONOGIRI**



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Mayjend Sutoyo S. 26 Wonogiri Telp. ( 0273 ) 321017 Faks. ( 0273 ) 321017  
Email : [dinasppkdbanp3a@wonogirikab.go.id](mailto:dinasppkdbanp3a@wonogirikab.go.id) Website : [dinasppkdbanp3a.wonogirikab.go.id](http://dinasppkdbanp3a.wonogirikab.go.id)

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023, terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Operasional;
- c) Laporan Perubahan Ekuitas
- d) Neraca;
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami :

1. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang isinya telah menyajikan Informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Data dan angka-angka yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang kami buat sudah di cros chek dengan Bidang Akuntansi BPKD dan sudah memadai untuk menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri,      Februari 2024

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN WONOGIRI**



NIP. 19690212-1990031010



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**SKPD : 2.14.0.00.2.08.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

1-1

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	(%)	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	17.598.649.448,00	16.468.290.442,00	93,58	16.277.647.983,00
5.1.	BELANJA OPERASI	15.632.382.448,00	14.723.485.442,00	94,19	12.885.482.983,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.748.976.048,00	2.411.100.583,00	87,58	2.506.032.884,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.882.286.400,00	12.312.384.859,00	95,58	10.379.430.089,00
5.2.	BELANJA MODAL	1.966.387.000,00	1.744.715.000,00	88,73	2.392.165.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.910.000,00	91.630.000,00	99,70	2.392.165.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.874.477.000,00	1.653.085.000,00	88,19	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.598.649.448,00)	(16.468.290.442,00)	93,58	-





**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	2023	2022	(%)
1	2	3	4	5
<b>7.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>7.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>			
7.1.01.	Pajak Daerah	-	-	-
7.1.02.	Retribusi Daerah	-	-	-
7.1.03.	Hasil Pengelaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
7.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	-	-	-
<b>7.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>			
7.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
7.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER</b>	-	-	-
<b>7.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>			
7.3.01.	Pendapatan Hibah	798.002.070,00	1.085.319.033,00	(26.47)
7.3.02.	Dana Darurat	-	-	-
7.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>798.002.070,00</b>	<b>1.085.319.033,00</b>	<b>(26.47)</b>
<b>7.5.</b>	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>			
7.5.01.	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA</b>	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>798.002.070,00</b>	<b>1.085.319.033,00</b>	<b>(26.47)</b>
<b>8.</b>	<b>BEBAN DAERAH</b>			
<b>8.1.</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>			
8.1.01.	Beban Pegawai	2.410.589.399,00	2.509.454.319,00	(3.94)
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	12.326.439.371,20	10.385.509.031,75	18.69
8.1.03.	Beban Bunga	-	-	-
8.1.04.	Beban Subsidi	-	-	-
8.1.05.	Beban Hibah	13.635.706,00	6.747.881,00	102.07
8.1.06.	Beban Bantuan Sosial	-	-	-
8.1.07.	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
8.1.08.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.469.436.969,37	1.451.195.904,72	1.26
	<b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>	<b>16.220.101.445,57</b>	<b>14.352.907.136,47</b>	<b>13.01</b>
<b>8.2.</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>			
8.2.01.	Beban Bagi Hasil	-	-	-
8.2.02.	Beban Bantuan Keuangan	-	-	-
	<b>JUMLAH BEBAN TRANSFER</b>	-	-	-
<b>8.3.</b>	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL-LO</b>			
8.3.01.	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-
8.3.02.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-
8.3.03.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	-	-	-
	<b>JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO</b>	-	-	-

(dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	2023	2022	(%)
1	2	3	4	5
8.4.	BEBAN LUAR BIASA			
8.4.01.	Beban Luar Biasa	-	-	-
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	-	-	-
8.5.	Beban Lain-Lain			
8.5.01.	Beban Lain-Lain	-	-	-
	JUMLAH BEBAN LAIN-LAIN	-	-	-
	JUMLAH BEBAN	16.220.101.445,57	14.352.907.136,47	13.01
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(15.422.099.375,57)	(13.267.588.103,47)	16.24
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-
7.4.	SURPLUS NON OPERASIONAL			
7.4.01.	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
7.4.02.	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
7.4.03.	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASI	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT DARI LO	(15.422.099.375,57)	(13.267.588.103,47)	16.24







**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**  
**2.14.0.00.2.08.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022**

URAIAN	2023	2022
Ekuitas	9.454.015.637,55	8.178.338.010,02
RK PPKD	16.468.200.442,00	15.277.847.983,00
Surplus/Defisit-LO	(15.422.099.375,57)	(13.267.588.103,47)
Persediaan Antar OPD	(826.236.987,00)	(734.380.252,00)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	9.673.879.716,98	9.454.015.637,55





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

2.14.0.00.2.08.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA

NERACA

Halaman 1 dari 1

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	2	3	4
1	ASET	9.770.143.429,98	9.545.494.705,55
2	ASET LANCAR	432.362.175,00	482.991.481,20
3	Persediaan	432.362.175,00	482.991.481,20
4	ASET TETAP	9.306.806.254,98	9.022.503.224,35
5	Tanah	447.480.000,00	447.480.000,00
6	Peralatan dan Mesin	12.067.851.999,59	12.520.141.145,24
7	Gedung dan Bangunan	8.617.157.144,00	6.964.072.144,00
8	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.764.050,00	72.764.050,00
9	Aset Tetap Lainnya	3.584.000,00	4.565.000,00
10	Akumulasi Penyusutan	(11.902.036.938,61)	(10.986.519.114,89)
11	ASET LAINNYA	30.961.000,00	40.000.000,00
12	Aset Tidak Berwujud	58.625.000,00	58.625.000,00
13	Aset Lain-lain	337.594.635,65	850.000,00
14	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(28.625.000,00)	(18.625.000,00)
15	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(336.613.635,65)	(850.000,00)
	JUMLAH ASET	9.770.143.429,98	9.545.494.705,55
17	KEWAJIBAN	96.263.713,00	91.479.068,00
18	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	96.263.713,00	91.479.068,00
19	Utang Belanja	96.263.713,00	91.479.068,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	96.263.713,00	91.479.068,00
21	EKUITAS	9.673.879.716,98	9.454.015.637,55
22	EKUITAS	9.673.879.716,98	9.454.015.637,55
23	Ekuitas	(6.794.320.725,02)	(5.823.632.345,45)
24	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	16.468.200.442,00	15.277.647.983,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	9.673.879.716,98	9.454.015.637,55
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.770.143.429,98	9.545.494.705,55



## KATA PENGANTAR

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2022 perubahan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 92 Tahun 2021 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah kabupaten Wonogiri. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan keuangan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu untuk kesempurnaan laporan keuangan ini, kami mohon saran dan masukan sekaligus koreksi dari semua pihak yang terkait, dengan harapan pada tahun-tahun yang akan datang Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri dapat disusun dan tersaji dengan lebih baik.

Wonogiri, Februari 2024

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**

**PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN WONOGIRI**

  
**MUBAROK SKM,MM**  
NIP. 19890212 199003 1 010



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPKB Dan P3A) tahun 2023 disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPKB Dan P3A) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan bersama – sama.

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **a. Maksud**

Maksud Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak disajikan dalam rangka pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan.

##### **b. Tujuan**

Tujuan penyajian laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah.

#### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

- a. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada pasal 3 ayat (1) angka 28 Pemerintah Kabupaten Wonogiri didirikan;
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 bahwa Akuntansi berbasis Akrua dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.
- c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

- peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- d. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - e. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - f. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - g. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - h. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
  - i. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- l. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- r. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 ;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023 .

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

#### **Bab IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan



## **Bab V Penjelasan pos – pos Laporan Keuangan**

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan
  - 5.1.1 Pendapatan
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Aset.
  - 5.1.4 Kewajiban.
  - 5.1.5 Ekuitas Dana.

## **Bab VI Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan**

## **Bab VII Penutup**

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET KINERJA**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Dinas Penengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri mempunyai dua urusan yaitu urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terdapat Anggaran Penerimaan karena tidak sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima Pendapatan, Sedangkan untuk Anggaran Belanja pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 17.598.649.448 , - .

Realisasi Belanja Rp. 16.468.200.442,- .atau 93,57 %.Pencapaian target Belanja pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri dilakukan dengan berbagai upaya koordinasi internal maupaun lintas sektor, sehingga pencapaian ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

#### **2.2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan Keuangan di Dinas PPKB Dan P3A kabupaten Wonogiri tidak terlepas dari kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setiap tahun Tahun Anggaran. Kebijakan umum anggaran terdiri dari Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

##### **2.2.1. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah, yaitu :**

Karena Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak termasuk OPD yang mengelola pendapatan, sehingga tidak mengacu pada kebijakan Anggaran Pendapatan.

##### **2.2.2. Kebijakan Anggaran Belanja Daerah, yaitu :**

- a. Mengutamakan belanja yang bersifat wajib (*fix-cost*) baru kemudian belanja lainnya pada setiap perencanaan belanja.

- b. Hemat, tidak mewah, efisien, sesuai kebutuhan yang diisyaratkan.
- c. Terarah, terkendali sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dana yang tersedia,
- d. Selalu memperhatikan ketentuan – ketentuan pengelolaan keuangan Negara yang diwajibkan, yang dibatasi maupun yang dilarang.

### **2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja**

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan mempunyai 7 Program, 17 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan.

Adapun indikator pencapaian target kinerja dari program dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

##### **1.1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

###### **1.1.1 Pelaksanaan Komunikasi informasi dan edukasi KG dan Perlindungan anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota**

Capaian Kegiatan:

Rasio KDRT

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 70.000.000

Keluaran :

Persentase Penerima Informasi dan edukasi KG dan PA bagi Keluarga

Hasil :

Penerima Informasi dan edukasi KG dan PA bagi Keluarga

##### **1.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

###### **1.2.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

Capaian Kegiatan:

Penerima Informasi dan Edukasi KG dan PA bagi Keluarga

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 5.000.000

Keluaran :

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang berperan aktif

Hasil :

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang berperan aktif

**2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**

**2.1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan di tingkat Kabupaten/Kota**

**2.1.1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota**

Capaian Kegiatan:

Persentase Ketersediaan data gender dan Anak

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 25.000.000

Keluaran :

Persentase OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak

Hasil :

Persentase OPD yang Mempunyai Data Gender dan Anak

**3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

**3.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah , Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten /Kota**

**3.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendamping Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten /Kota.**

Capaian Kegiatan :

Persentase pemenuhan Hak Anak

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 50.000.000



Keluaran :

Persentase Lembaga Pemerintah,Non Pemerintah dan Dunia Usaha dalam PHA

Hasil :

Persentase lembaga pemerintah,Non pemerintah dan Dunia Usaha dalam PHA

**4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**4.1. Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**

**4.1.1Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

**4.1.2Evaluasi Kinerja perangkat daerah**

Capaian Kegiatan :

Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintah daerah

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 22.000.000

Keluaran :

Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun

Hasil :

Persentase Penyusunan Administrasi Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun

.

**4.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**4.2.1Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

**4.2.2Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD**

Capaian Kegiatan :

Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 2.723.586.048

Keluaran :

Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun

Hasil :

Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun

**4.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**4.3.1Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

#### **4.3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

#### **4.3.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

#### **4.3.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

##### Capaian Kegiatan :

Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah

##### Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 167.000.000,-

##### Keluaran :

Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah

##### Hasil :

Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah

#### **4.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

##### **4.4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

##### **4.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air**

##### **4.4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

##### Capaian Kegiatan :

Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah

##### Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 1.050.988.000,-

##### Keluaran :

Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

##### Hasil :

Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

#### **4.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

##### **4.5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporan**

##### **4.5.2 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lain**

##### Capaian Kegiatan :

Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah

##### Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000,-

##### Keluaran :

Persentase pemeliharaan barang milik daerah

Hasil :

Persentase pemeliharaan barang milik daerah

## **5. Program Pengendalian Penduduk**

### **5.1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah,Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**

#### **5.1.1Implementasi Pendidikan Kependudukan dalam Program Kependudukan dan KB**

Capaian Kegiatan :

Total/TFR (Total Fertinity Rate)

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 20.000.000,-

Keluaran :

Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan

Hasil :

Jumlah Penerima Implementasi Pendidikan Kependudukan

### **5.2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Capaian daerah Kabupaten/Kota**

#### **5.2.1Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga**

#### **5.2.2Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB**

Capaian Kegiatan :

Persentase peningkatan peserta KB Aktif

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 214.200.000,-

Keluaran :

Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi KKBPK

Hasil :

Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi KKBPK

## **6. Program Pembinaan Keluarga Berencana**

**6.1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)**

**Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya lokal.**

**6.1.1 Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruangan**

**6.1.2 Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)**

**6.1.3 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK**

**6.1.4 Pengendalian Program KKBPK**

Capaian Kegiatan :

Persentase Peningkatan peserta KB Aktif

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 2.135.750.000

Keluaran :

Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKBPK

Hasil :

Jumlah Promosi dan KIE serta sosialisasi Program KKBPK

**6.2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**

**6.2.1 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)**

Capaian Kegiatan :

Persentase Peningkatan KB Aktif

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 1.054.400.000,-

Keluaran :

Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD

Hasil :

Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD

**6.3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**

**6.3.1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Dan Jejaringnya.**



**6.3.2Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**

**6.3.3Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB**

**6.3.4Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesesahatan termasuk jaringan dan jejaringnya**

**6.3.5Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencanan Dan Kesehatan Reproduksi**

**6.3.6Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak**

**6.3.6Peningkatan Kesertaan KB Pria**

Capaian Kegiatan :

Persentase Peningkatan peserta KB Aktif

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 3.469.025.000,-

Keluaran :

Persentase Pelayanan KB di Daerah

Hasil :

Persentase Pelayanan KB di Daerah

**6.4Pemberdayaan dan Peningkatan Peran sera Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB**

**6.4.1Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB**

Capaian Kegiatan :

Persentase Peningkatan peserta KB aktif

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 1.078.500.000,

Keluaran :

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bangga Kencana

Hasil :

Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Bangga Kencana

**7. Program Pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

**7.1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga**

**7.1.1Pengadaan sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS)**

**7.1.2Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB.BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**

**7.1.3Penyediaan biaya operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargasarana (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R,dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga UPPKS)**

**7.1.4Promosi dan sosialisasi Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)**

Capaian Kegiatan :

Indek Pembagunan Keluarga

Masukan :

Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 5.443.200.000,-

Keluaran :

Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Hasil :

Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	APBD	Angggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	Target	Naik / turun/ hemat
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.	Belanja	17.598.649.448, -	16.468.200.442, -	93,57%	100%	Turun

Sedangkan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB dan P3A) Kabupaten Wonogiri tidak termasuk Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan.

Secara keseluruhan realisasi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dikatakan lebih dari 90% hal ini dikarenakan adanya upaya pemanfaatan anggaran guna tercapainya program kegiatan Pengelolaan Belanja Tahun Anggaran 2023 pada Dinas PPKB dan P3A realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 tercapai sebesar Rp 16.468.200.442,- atau 93,57 % dari total pagu anggaran Rp. 17.598.649.448,-. Hal ini dikarena penyerapan pada Anggaran Belanja gaji pegawai tidak bisa terserap secara maksimal yaitu dari pagu anggaran sebesar Rp 2.722.586.048,- realisasi sebesar Rp 2.385.566.833,- atau sebesar 87,62% dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan meninggal dunia. Ada beberapa Sub Kegiatan yang kurang maksimal dalam penyerapan anggaran berkaitan dengan adanya efisiensi Nilai Kontrak Pengadaan dibandingkan dengan pagu anggaran, tetapi secara fisik

sudah tercapai 100%, sub kegiatan dimaksud adalah Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB tercapai 88,18% dan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebesar 64,67%. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK tercapai 70,23% dikarenakan Dinas PPKB dan P3A pada tahun 2023 hanya melakukan sampling 1 kecamatan dalam pelaksanaan Audit Kasus Stunting sedangkan kecamatan yang lain dilakukan oleh OPD lain dengan sasaran baduta dan balita. Langkah kedepan pelaksanaan sampling sasaran Audit Kasus Stunting dilakukan di 25 Kecamatan.

### **3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Berdasarkan pada analisa permasalahan yang dilakukan atas keseluruhan program dan kegiatan selama tahun 2023 terutama dari sisi sistem Pengelolaan Administrasi Keuangan, maka dapat dirumuskan hambatan dan kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Adanya beberapa pegawai yang purna tugas baik pejabat struktural dan pejabat fungsional khusus dan belum segera terisi mengakibatkan proses pengelolaan keuangan agak kurang lancar..
2. Adanya Sub Kegiatan baru Pengendalian Program KKBPK yang digunakan untuk Audit Kasus Stunting perlu adanya koordinasi dengan lintas sektor.
3. Terbatasnya SDM baik secara kualitas maupun kuantitas dalam pengelolaan keuangan.

Langkah pemecahannya adalah dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memaksimalkan SDM yang ada dalam pengelolaan Administrasi keuangan.
2. Melakukan strategi meningkatkan koordinasi lintas sector.
3. Melakukan percepatan penyerapan anggaran guna pencapaian target.
4. Terus melakukan bimbingan dan pelatihan dalam setiap pelaksanaan anggaran kegiatan dalam pemahaman pengelolaan keuangan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

#### **4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Sebagai entitas pelaporan adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

#### **4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri disajikan dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah Accrual Basis dimana Pengakuan suatu kejadian atau peristiwa pada saat timbulnya hak dan kewajiban

#### **4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

##### **a. Pendapatan**

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

**b. Belanja**

Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan dari kas daerah atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya belanja.

**c. Pembiayaan**

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan pembiayaan.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.**

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah kabupaten Wonogiri, sebagai berikut :

**a. Kas dan Bank**

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) / Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) / Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di

bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

**b. Piutang**

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.

**c. Persediaan**

Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian, harga standar, dan harga / nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya.

**d. Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi dalam saham, BUMD yang dijual / ditukar dengan aktiva lain-lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata – rata.

#### **4.5 Aktiva Tetap**

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva lainnya.

- Aktiva Tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Aktiva

tetap dinilai dengan histories atau harga perolehan. Jika penilaian aktiva tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aktiva tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

Penyusutan Aktiva Tetap sampai dengan laporan keuangan ini disajikan, belum dilakukan, dan oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Wonogiri tidak membuat kebijakan tentang aktiva tetap.

#### 4.6 Aktiva Lain – Lain

Aktiva lain – lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan. Aktiva lain – lain meliputi piutang angsuran, built operate and transfer (BOT) dan Bangunan Dalam Pengerjaan.

#### 4.7 Hutang Jangka Pendek

Hutang Jangka Pendek merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Hutang jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali dan diukur dengan nilai nominal mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi

Hutang jangka pendek terdiri dari :

- **Bagian lancar hutang jangka panjang**, adalah bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Bagian lancar hutang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.
- **Hutang perhitungan pihak ketiga**, adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Hutang perhitungan pihak ketiga diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang, kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran hutang perhitungan pihak ketiga yang diakui dalam periode berjalan.

#### 4.8 Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Hutang jangka panjang diukur dengan nilai



nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali dan diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi. Hutang Dalam Negeri, adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri. Hutang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.

#### **4.9 Ekuitas Dana**

Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang. Ekuitas dana terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara asset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

- Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

- Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang - undangan.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN**

Penyajian Laporan Keuangan Dinas PPKB dan P3A mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

**5.1. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca**

**5.1.1 Pendapatan**

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Untuk Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri tidak ada komponen rekening pendapatan, karena bukan SKPD yang mengelola pendapatan.

**5.1.2 Belanja**

Tahun Anggaran 2023 jumlah total realisasi belanja pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut sebesar Rp. 116.468.200.442,-

Yang dapat dirinci sebagai berikut :

**a. Belanja Pegawai**

Realisasi belanja pegawai pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri sebesar Rp.2.411.100,583 atau 87,67% , -

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Belanja Pegawai	2.749.976.448,-	2.411.100.583,-	( 338.875.865,-)

**b. Belanja Barang Dan Jasa**

Realisasi belanja barang dan jasa pada Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 12.312.384.859 atau 95,58 %., -

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Belanja barang dan jasa	12.882.286.400,-	12.312.384.859,-	(569.901.541,-)

**c. Belanja Modal**

Realisasi belanja modal pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 1.744.715.000 atau 88,73%,-

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/Kurang (Rp.)
1.	Belanja Modal	1.966.387.000,-	1.744.715.000,-	(221.672.000,-)

**Penjelasan atas Neraca**

**5.1.3 Aset**

Berdasarkan perhitungan atas aset tahun 2023 baik terhadap aset lancar, aset tetap maupun aset lainnya maka dapat dijelaskan posisi aset Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

**Aset lancar**

Jumlah aset lancar sejumlah Rp. 482.991.481,20,- adalah kas di bendahara pengeluaran adalah Rp 0,-, dan jumlah persediaan akhir 31 Desember 2023 sebesar Rp 482.991.481,20,-

**Aset Tetap**

Jumlah dari Aset Tetap adalah Rp 9.022.503.224,35 yang terdiri dari:

1. Tanah Rp 447.480.000,00,-
2. Peralatan dan Mesin Rp. 12.611.771.145,24,-
3. Gedung dan bangunan Rp 8.617.157.144,00,-
4. Jalan,jaringan, dan Irigasi Rp. 72.764.050,00,-
5. Aset tetap lainnya Rp 4.565.000,00,-
6. Akumulasi penyusutan Aset Tetap (Rp 10.986.519.114,89)
7. Aset tak berwujud Rp 58.625.000,00,-

8. Aset Lain-lain Rp 850.000,00,-
9. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Rp 18.625.000,00,)
10. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak berat (Rp850.000.00,-)

### **Kewajiban**

Berdasarkan pada perhitungan pada akhir tahun 2023 terdapat kewajiban Rp. 96.263.713,00,- yang terdiri dari Utang Belanja pegawai Rp. 83.125.666,00,- dan utang belanja barang jasa Rp. 13.138.047,00,- yang merupakan kewajiban yang harus diselesaikan.

### **Ekuitas dana**

Sebagaimana neraca per 31 Desember 2023 Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten wonogiri yang telah disusun Ekuitas Rp 9.673.879.716,98,-

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN**

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah daerah serta ketentuan – ketentuan lain yang masih berlaku.

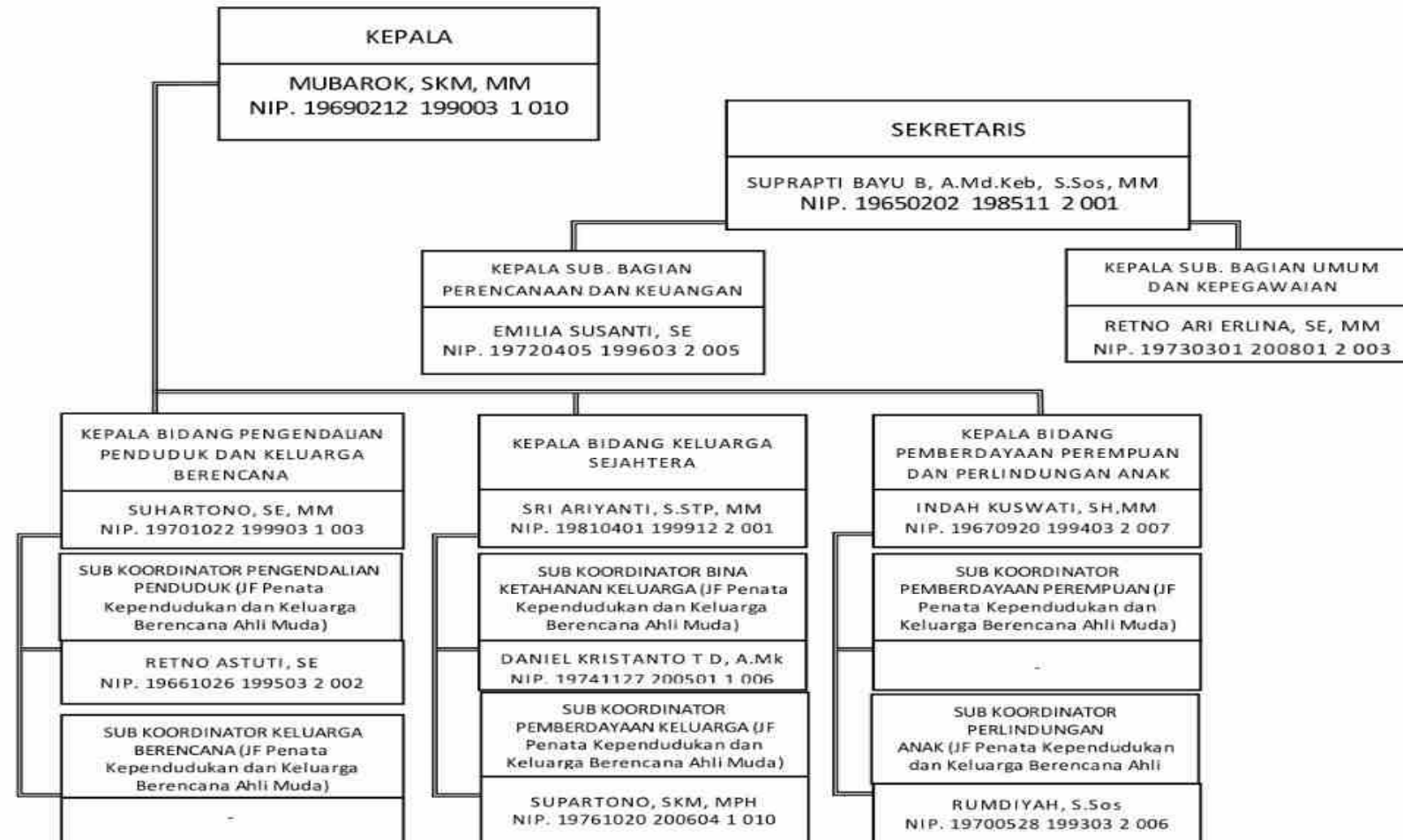
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Wonogiri, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 90 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri (Dinas PPKB dan P3A), Dinas PPKB dan P3A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Sedangkan struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
  - a. Kasubag Perencanaan dan Keuangan
  - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
  - a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk

- b. Sub Koordinator Keluarga Berencana
- 4. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera
  - a. Sub Koordinator Bina Ketahanan Keluarga
  - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga
- 5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan
  - b. Sub Koordinator Perlindungan Anak

**BAGAN ORGANISASI**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN WONOGIRI**



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan Dan perlindungan anak Kabupaten Wonogiri dengan berpedoman pada Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku yang memuat informasi atas pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN WONOGIRI**



**MUBAROK.SKM,MM**  
Pembina TK I  
NIP. 19690212 199003 1 010



**REKAPITULASI LAPORAN MUTASI BARANG**  
**INTRA COUNTABLE**  
s.d 31 DESEMBER 2023

SKPD : 2.14.14. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DAN PP DAN PA  
PROVINSI : JAWA TENGAH

Halaman 1 dari 3 Halaman

KOD	REKONSTRUKSI	JENIS	DURASI	KETERANGAN	URAIAN	SALDO AWAL		MUTASI				SALDO AKHIR		KETERANGAN
								BERKURANG		BERTAMBAH				
						UNIT	NILAI	UNIT	NILAI	UNIT	NILAI	UNIT	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3				ASET TETAP	2.358	21.052.107.328,24	182	841.585.145,85	98	188.315.000,00	2.762	21.268.837.193,09	
1	3	1			TANAH	8	447.480.000,00	0	0,00	0	0,00	8	447.480.000,00	
1	3	1	01		TANAH	8	447.480.000,00	0	0,00	0	0,00	8	447.480.000,00	
1	3	1	01	01	TANAH PERSEGI	8	447.480.000,00	0	0,00	0	0,00	8	447.480.000,00	
1	3	2			PERALATAN DAN MESIN	2.700	12.220.141.145,24	108	842.894.145,85	98	188.315.000,00	2.678	12.267.851.895,85	
1	3	2	01		ALAT BESAR	2	29.579.900,00	0	0,00	0	0,00	2	29.579.900,00	
1	3	2	01	03	ALAT BANTU	2	29.579.900,00	0	0,00	0	0,00	2	29.579.900,00	
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN	109	5.458.789.184,00	15	208.155.518,00	0	0,00	94	5.250.633.674,00	
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	108	5.458.484.184,00	15	208.155.518,00	0	0,00	93	5.248.328.674,00	
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	2.305.000,00	0	0,00	0	0,00	1	2.305.000,00	
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.993	2.958.779.555,15	87	125.482.978,35	52	18.305.000,00	1.958	2.862.822.498,85	
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	243	817.822.421,56	9	32.126.355,56	91	17.000.000,00	283	482.796.066,56	
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	1.883	1.467.885.477,88	78	103.325.728,78	1	2.305.000,00	1.806	1.368.564.756,88	
1	3	2	05	03	MESIN DAN KURSI KEBERKAPAT PEJABAT	87	223.171.888,00	0	0,00	0	0,00	87	223.171.888,00	
1	3	2	05		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	118	744.718.787,00	3	12.257.292,45	0	0,00	115	732.461.494,55	
1	3	2	05	01	ALAT STUDIO	59	384.461.787,00	2	5.510.518,80	0	0,00	57	378.951.267,00	
1	3	2	05	02	ALAT KOMUNIKASI	59	360.257.000,00	1	8.688.792,45	0	0,00	58	351.568.207,55	
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	172	1.038.447.888,23	1	7.705.903,51	0	0,00	171	1.028.742.984,72	
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	172	1.038.447.888,23	1	7.705.903,51	0	0,00	171	1.028.742.984,72	
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM	16	36.196.500,00	0	0,00	0	0,00	16	36.196.500,00	
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	16	36.196.500,00	0	0,00	0	0,00	16	36.196.500,00	
1	3	2	10		KOMPUTER	263	1.458.352.548,80	44	227.012.360,34	14	988.010.000,00	173	1.311.352.188,52	
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	125	1.329.664.298,80	20	241.115.310,34	12	888.100.000,00	108	1.258.558.988,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	78	128.748.200,00	18	15.897.000,00	2	3.810.800,00	54	117.701.200,00	
1	3	2	10		ALAT PERAGA	128	1.485.031.800,00	0	0,00	0	0,00	128	1.485.031.800,00	
1	3	2	10	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	128	1.485.031.800,00	0	0,00	0	0,00	128	1.485.031.800,00	
1	3	2	10		RAMBU - RAMBU	21	91.245.000,00	0	0,00	0	0,00	21	91.245.000,00	
1	3	2	10	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	21	91.245.000,00	0	0,00	0	0,00	21	91.245.000,00	
1	3	3			GEDUNG DAN BANGUNAN	43	8.817.157.144,00	0	0,00	0	0,00	43	8.817.157.144,00	
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG	28	7.224.908.652,00	0	0,00	0	0,00	28	7.224.908.652,00	
1	3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28	7.224.908.652,00	0	0,00	0	0,00	28	7.224.908.652,00	
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	15	1.382.656.492,00	0	0,00	0	0,00	15	1.382.656.492,00	
1	3	3	04	01	TUGUPANDA BATAS	15	1.382.656.492,00	0	0,00	0	0,00	15	1.382.656.492,00	
1	3	4			JALAN, JARINGAN DAN BRGAS	8	72.764.050,00	0	0,00	0	0,00	8	72.764.050,00	
1	3	4	04		JARINGAN	8	72.764.050,00	0	0,00	0	0,00	8	72.764.050,00	
1	3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	8	58.318.550,00	0	0,00	0	0,00	8	58.318.550,00	
1	3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	1	14.447.500,00	0	0,00	0	0,00	1	14.447.500,00	
1	3	5			ASET TETAP LAINNYA	43	4.585.000,00	12	961.000,00	0	0,00	31	3.584.000,00	
1	3	5	01		BAHAN PERPUSTAKAAN	43	4.585.000,00	12	961.000,00	0	0,00	31	3.584.000,00	
1	3	5	01	01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	43	4.585.000,00	12	961.000,00	0	0,00	31	3.584.000,00	
1	5				ASET LAINNYA	14	58.425.000,00	0	0,00	125	336.744.635,05	140	398.219.635,05	
1	5	3			ASET TIDAK BERWALID	3	58.825.000,00	0	0,00	0	0,00	3	58.825.000,00	
1	5	3	01		ASET TIDAK BERWALID	3	58.825.000,00	0	0,00	0	0,00	3	58.825.000,00	
1	5	3	01	01	ASET TIDAK BERWALID	3	58.825.000,00	0	0,00	0	0,00	3	58.825.000,00	
1	5	4			ASET LAIN-LAIN	11	800.000,00	0	0,00	125	336.744.635,05	140	537.504.635,05	
1	5	4	01		ASET LAIN-LAIN	11	800.000,00	0	0,00	125	336.744.635,05	140	537.504.635,05	
1	5	4	01	01	ASET LAIN-LAIN	11	800.000,00	0	0,00	125	336.744.635,05	140	537.504.635,05	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL						2,972	21.721.542.339,34	103	641.585.143,65	301	525.099.635,65	2,911	21.595.858.829,34	



Wonorejo, 31 Desember 2023

Pengurus Barang

*DEPI MAEMONA, A.Md*

**DEPI MAEMONA, A.Md**  
NIP. 198908242020122002

# LAPORAN REKAPITULASI MUTASI BARANG PERSEDIAAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI

Tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2023

## MUTASI

NO	BARANG	SATUAN	SALDO AWAL		MASUK		KELUAR		SALDO AKHIR	
			JUMLAH	HARGA	JUMLAH	HARGA	JUMLAH	HARGA	JUMLAH	HARGA
1	ALKON - ABPK - HIBAH	BUAH	31	2.361.425,00	-	-	2	152.350,00	29	2.209.075,00
2	ALKON - ADS - HIBAH	BUAH	8.223	5.856.377,00	17.900	12.512.100,00	18.036	12.715.664,00	8.087	5.652.813,00
3	ALKON - ALAT PERAGA KIE - HIBAH	SET	1	967.750,00	-	-	-	-	1	967.750,00
4	ALKON - ALKOHOL SWAB - HIBAH	BUAH	856	108.712,00	3.700	363.200,00	3.626	397.512,00	930	74.400,00
5	ALKON - ANASTASI KIT - HIBAH	SET	1	864.270,00	-	-	-	-	1	864.270,00
6	ALKON - ANTISEPTIK 30 ML/PEVIDON IODINE- HIBAH	BUAH	182	647.680,00	370	1.110.000,00	396	1.289.680,00	156	468.000,00
7	ALKON - BP3K - HIBAH	BUAH	12	997.488,00	-	-	1	83.124,00	11	914.364,00
8	ALKON - DUK STERIL - HIBAH	BUAH	1.993	13.640.159,00	3.700	23.730.000,00	3.816	25.169.659,00	1.877	12.200.500,00
9	ALKON - FACEMASK/MASKER - HIBAH	BUAH	4.241	2.401.900,00	3.700	1.110.000,00	3.116	1.887.250,00	4.825	1.624.650,00
10	ALKON - FELLOPE RING - HIBAH	BUAH	100	3.003.000,00	100	3.023.000,00	200	6.026.000,00	-	0
11	ALKON - IMPLANT I - HIBAH	SET	-	-	100	19.000.000,00	100	19.000.000,00	-	0
12	ALKON - IMPLANT II - HIBAH	SET	1.796	269.426.940,00	3.600	540.054.000,00	3.756	563.456.340,00	1.640	246.024.600,00
13	ALKON - IMPLANT REMOVAL KIT - HIBAH	SET	14	26.292.420,00	-	-	-	-	14	26.292.420,00
14	ALKON - IUD COPPER T - HIBAH	UNIT	286	3.575.000,00	1.075	13.525.850,00	1.066	13.379.720,00	295	3.721.130,00
15	ALKON - IUD KIT - HIBAH	SET	2	8.870.400,00	-	-	-	-	2	8.870.400,00
16	ALKON - IUD KIT STERILISATOR - HIBAH	SET	2	9.528.200,00	-	-	-	-	2	9.528.200,00
17	ALKON - IUD SLEEK - HIBAH	BUAH	-	-	50	655.900,00	-	-	50	655.900,00
18	ALKON - KASA STERIL - HIBAH	BOX	2.240	1.049.920,00	2.100	787.500,00	4.212	1.789.420,00	128	48.000,00
19	ALKON - KONDOM - HIBAH	PACK	3.960	20.592.000,00	9.600	49.920.000,00	12.648	65.769.600,00	912	4.742.400,00
20	ALKON - MINI PIL - HIBAH	CYCLE	-	-	800	3.213.600,00	800	3.213.600,00	-	0
21	ALKON - MINILAP KIT II - HIBAH	UNIT	1	75.000,00	-	-	-	-	1	75.000,00
22	ALKON - MINILAP KIT III - HIBAH	UNIT	1	7.180.000,00	-	-	-	-	1	7.180.000,00
23	ALKON - OBAT ANALGETIK/ASAM MEFENAMAT - HIBAH	STRIP	1.880	2.330.400,00	3.700	4.440.000,00	4.750	5.774.400,00	830	996.000,00
24	ALKON - OBAT ANASTASI LOKAL/LIDOCAIN - HIBAH	AMPUL	165	139.755,00	5.300	5.669.400,00	3.766	3.828.121,00	1.699	1.981.034,00
25	ALKON - OBGYNBED - HIBAH	UNIT	2	12.475.789,00	-	-	-	-	2	12.475.789,00
26	ALKON - PHANTOM IUD - HIBAH	BUAH	1	1.685.000,00	-	-	-	-	1	1.685.000,00
27	ALKON - PIL KB - HIBAH	CYCLE	11.170	12.879.010,00	13.000	14.986.000,00	14.770	17.029.810,00	9.400	10.835.200,00
28	ALKON - PLESTER ANTISEPTIK - HIBAH	BUAH	1.816	7.173.200,00	3.700	13.690.000,00	3.876	14.795.200,00	1.640	6.068.000,00
29	ALKON - SAFETY BOX - HIBAH	BUAH	73	1.869.749,00	142	2.452.520,00	149	3.398.269,00	66	924.000,00
30	ALKON - SARUNG TANGAN - HIBAH	PASANG	2.252	10.359.200,00	3.700	18.317.000,00	3.832	17.311.200,00	2.120	11.365.000,00
31	ALKON - STERILISATOR - HIBAH	UNIT	1	2.153.250,00	-	-	-	-	1	2.153.250,00
32	ALKON - SUNTIK - HIBAH	VIAL	4.500	21.600.000,00	14.000	67.200.000,00	13.860	66.528.000,00	4.640	22.272.000,00
33	ALKON - SUNTIK/GESTIN F3 - HIBAH	VIAL	-	-	200	2.242.000,00	200	2.242.000,00	-	0
34	ALKON - U TEKNIK - HIBAH	BUAH	2	190.000,00	-	-	2	190.000,00	-	0
35	ALKON - VTP KIT - HIBAH	BUAH	10	21.980.200,00	-	-	-	-	10	21.980.200,00
36	AMPLOP - PANJANG (KABINET PUTIH)	DUS	1	22.300,00	2	44.600,00	2	44.600,00	1	22.300,00




37	AMPLOP - TANGGUNG	DUS	-	-	90	1.467.000,00	90	1.467.000,00	-	0
38	AMPLOP BUPATI CASING SEDANG	LEMBAR	1	385	-	-	1	385	-	0
39	AMPLOP CASING UK SEDANG	LEMBAR	-	-	300	123.000,00	300	123.000,00	-	0
40	AMPLOP COKLAT UK FOLIO	LEMBAR	-	-	40	98.000,00	40	98.000,00	-	0
41	AMPLOP COKLAT UK STOPMAP	LEMBAR	64	156.800,00	100	245.000,00	108	264.600,00	56	137.200,00
42	AMPLOP SETDA CASING SEDANG	LEMBAR	-	-	300	123.000,00	286	117.260,00	14	5.740,00
43	ANTISEPTIK HANDRUUB	BUAH	19	803.700,00	55	2.326.500,00	62	2.622.600,00	12	507.600,00
44	BAYGON SPRAY ISI - 600 ML	KALENG	2	110.600,00	10	553.000,00	11	608.300,00	1	55.300,00
45	BINDER KLIP - 15MM (NO. 105)	DUS	12	48.720,00	20	81.200,00	24	97.440,00	8	32.480,00
46	BINDER KLIP - 19MM (NO. 107)	DUS	3	13.710,00	20	91.400,00	15	68.550,00	8	36.560,00
47	BINDER KLIP - 25MM (NO. 111)	DUS	11	83.050,00	20	151.000,00	19	143.450,00	12	90.600,00
48	BKB KIT STUNTING	SET	-	-	20	232.800.000,00	20	232.800.000,00	-	0
49	BOLPOINT - PENTEL	BUAH	1	108.000,20	-	-	1	108.000,20	-	0
50	BOLPOINT - PILOT	BUAH	12	35.400,00	20	59.000,00	26	76.700,00	6	17.700,00
51	BUKU AGENDA - FOLIO 100 LBR	BUAH	1	30.400,00	1	30.400,00	1	30.400,00	1	30.400,00
52	BUKU AGENDA - FOLIO 50 LBR	BUKU	1	17.300,00	1	17.300,00	2	34.600,00	-	0
53	BUKU EKSPEDISI 100 L8	BUKU	1	10.000,00	3	30.000,00	2	20.000,00	2	20.000,00
54	BUKU KWITANSI - BESAR	BUAH	2	20.600,00	5	51.500,00	5	51.500,00	2	20.600,00
55	CARTRIDGE HP 680	BUAH	-	-	18	3.330.000,00	18	3.330.000,00	-	0
56	CARTRIDGE TYPE CANON BLACK	BUAH	2	440.000,00	6	1.320.000,00	8	1.760.000,00	-	0
57	CARTRIDGE TYPE CANON COLOUR	BUAH	-	-	5	1.125.000,00	5	1.125.000,00	-	0
58	CARTRIDGE TYPE HP BLACK	BUAH	2	240.000,00	-	-	2	240.000,00	-	0
59	CATRIDGE EPSON L120	BUAH	-	-	2	1.800.000,00	2	1.800.000,00	-	0
60	CD - CD RW	BUAH	10	59.100,00	10	59.100,00	10	59.100,00	10	59.100,00
61	CETAK MMT	LEMBAR	-	-	1.004	35.271.300,00	1.004	35.271.300,00	-	0
62	CETAK R/1 PUS	LEMBAR	-	-	12.100	10.285.000,00	12.100	10.285.000,00	-	0
63	CETAK SPANDUK	BUAH	-	-	1	95.700,00	1	95.700,00	-	0
64	EMBER PLASTIK - KECIL (6 GALON)	BUAH	-	-	3	54.000,00	3	54.000,00	-	0
65	FILE BOX - PLASTIK	BUAH	-	-	12	235.200,00	8	156.800,00	4	78.400,00
66	GUNTING - TANGGUNG	BUAH	5	68.500,00	-	-	1	13.700,00	4	54.800,00
67	HANDUK KECIL	BUAH	2	48.000,00	5	120.000,00	7	168.000,00	-	0
68	HECHMACHINE - BESAR MAX HD 50	BUAH	2	143.400,00	3	215.100,00	3	215.100,00	2	143.400,00
69	HECHMACHINE - KECIL MAX HD 10	BUAH	1	20.509,00	6	123.600,00	4	82.309,00	3	61.800,00
70	HECNEICES - BESAR	DUS	10	51.000,00	10	51.000,00	10	51.000,00	10	51.000,00
71	HECNEICES - KECIL	DUS	-	-	136	720.800,00	132	699.600,00	4	21.200,00
72	IKRAK/PENGKI PLASTIK	BUAH	-	-	4	144.000,00	3	108.000,00	1	36.000,00
73	INK CARTRIDGE/TINTA DESK JET - CARTRIDGE 810	BUAH	1	254.600,00	5	1.273.000,00	6	1.527.600,00	-	0
74	INK CARTRIDGE/TINTA DESK JET - CARTRIDGE 811	BUAH	1	241.000,00	5	1.205.000,00	4	964.000,00	2	482.000,00
75	INK CARTRIDGE/TINTA DESK JET - CARTRIDGE HP 678 BLACK	BUAH	-	-	3	360.000,00	2	240.000,00	1	120.000,00
76	INK CARTRIDGE/TINTA DESK JET - CARTRIDGE HP 802 COLOUR	BUAH	-	-	2	350.000,00	2	350.000,00	-	0
77	INK CARTRIDGE/TINTA DESK JET - REFILL BLACK	BUAH	16	720.000,00	23	1.036.350,00	31	1.395.000,00	8	361.350,00
78	INK CARTRIDGE/TINTA DESK JET - REFILL BLACK EPSON L SERIES	BUAH	2	180.000,00	10	900.000,00	9	810.000,00	3	270.000,00
79	INK CARTRIDGE/TINTA DESK JET - REFILL COLOUR	BUAH	5	225.000,00	1	46.350,00	6	271.350,00	-	0
80	ISI BAGUS	SET	2	11.460,00	10	57.300,00	12	68.760,00	-	0
81	ISI BOLPOINT - PENTEL	BUAH	6	133.800,00	10	223.000,00	7	156.100,00	9	200.700,00



82	ISOLASI - ISOLASI BOLAK-BALIK 2"	BUAH	-	-	5	86.500,00	3	51.900,00	2	34.600,00
83	ISOLASI - ISOLASI KERTAS BESAR	BUAH	-	-	3	58.500,00	-	-	3	58.500,00
84	ISOLASI - ISOLASI KERTAS TANGGUNG	BUAH	-	-	2	30.600,00	2	30.600,00	-	0
85	KAIN PEL	BUAH	-	-	6	54.600,00	6	54.600,00	-	0
86	KAPUR BARUS	KG	1	50.000,00	1	50.000,00	2	100.000,00	-	0
87	KARTU KENDALI KELUAR	BUKU	2	50.800,00	20	508.000,00	16	406.400,00	6	152.400,00
88	KARTU KENDALI MASUK	BUKU	11	279.400,00	20	508.000,00	23	584.200,00	8	203.200,00
89	KEMOCENG BULU AYAM	BUAH	-	-	5	147.500,00	5	147.500,00	-	0
90	KERANJANG DOBEL	BUAH	-	-	6	354.600,00	6	354.600,00	-	0
91	KERTAS FAKSIMILE FAX	ROL	4	174.800,00	4	174.800,00	4	174.800,00	4	174.800,00
92	KERTAS FOTO	PACK	-	-	1	142.100,00	-	-	1	142.100,00
93	KERTAS HVS 70 GRAM (FOTO COPY): - FOLIO	RIM	-	-	280	18.144.000,00	280	18.144.000,00	-	0
94	KERTAS HVS 80 GRAM (FOTO COPY) - KWARTO	PACK	-	-	10	450.000,00	10	450.000,00	-	0
95	KERTAS TISU	BUAH	5	81.500,00	50	815.000,00	43	700.900,00	12	195.600,00
96	KESSEN STEMPEL	BUAH	2	24.400,00	2	24.400,00	2	24.400,00	2	24.400,00
97	KLIP - KERTAS NO. 3/NO. 4	DUS	14	59.500,00	30	135.000,00	39	169.500,00	5	25.000,00
98	KREOLIN WANGI	BOTOL	7	105.000,00	24	360.000,00	25	375.000,00	6	90.000,00
99	KWITANSI SPJ 1/2 FOLIO CARBONIS	BUKU	3	163.500,00	102	4.517.600,00	97	4.346.700,00	8	334.400,00
100	LAP KACA	BUAH	1	4.789,00	11	52.680,00	12	57.469,00	-	0
101	LEAFLET/ BROSUR	LEMBAR	-	-	26.000	32.700.000,00	26.000	32.700.000,00	-	0
102	LEM - TACKOL	BOTOL	-	-	6	28.800,00	3	14.400,00	3	14.400,00
103	MAP - MAP GANTUNG	BUAH	4	17.280,00	200	864.000,00	204	881.280,00	-	0
104	MATERAI RP. 10.000,-	LEMBAR	27	270.000,00	180	1.800.000,00	207	2.070.000,00	-	0
105	ORDNER FOLIO	BUAH	4	92.000,00	24	552.000,00	22	506.000,00	6	138.000,00
106	PEL - PEL BAHAN SUMBU BULAT	BUAH	-	-	3	150.000,00	3	150.000,00	-	0
107	PEMBERSIH LANTAI - REFILL 800ML	BUAH	9	202.500,00	36	810.000,00	39	877.500,00	6	135.000,00
108	PEMBERSIH PORSELIN/CLOSED - BEBEK SEMERBAK CLOSET 450 ML	BOTOL	7	143.500,00	24	492.000,00	26	533.000,00	5	102.500,00
109	PENERUS DISPOSISI 1/2 FOLIO ISI 100	BUKU	3	45.000,00	12	180.000,00	9	135.000,00	6	90.000,00
110	PENJILIDAN	BUKU	-	-	71	715.000,00	71	715.000,00	-	0
111	PENSIL - 2B	BUAH	6	25.140,00	10	41.900,00	1	4.190,00	15	62.850,00
112	PERFORATOR - BESAR	BUAH	-	-	1	93.900,00	1	93.900,00	-	0
113	PERFORATOR - TANGGUNG	BUAH	-	-	1	42.500,00	-	-	1	42.500,00
114	PEWANGI RUANGAN - KEMASAN SPRAY ISI 350ML	KALENG	1	25.000,00	25	625.000,00	19	475.000,00	7	175.000,00
115	POSTER	LEMBAR	-	-	800	19.200.000,00	800	19.200.000,00	-	0
116	REGULER - PENGGANDAAN	LEMBAR	-	-	100.446	30.133.800,00	100.446	30.133.800,00	-	0
117	SABUN - COLEK	BUAH	10	50.000,00	65	325.000,00	68	340.000,00	7	35.000,00
118	SABUN - DETERGENT LIQUID REFILL KEMASAN 800ML	BUAH	3	55.500,00	15	277.500,00	14	259.000,00	4	74.000,00
119	SABUN - HANDSOAP BOTOL BESAR	BOTOL	12	348.000,00	25	725.000,00	32	928.000,00	5	145.000,00
120	SABUN HANDSOAP REFILL	BUAH	1	31.900,00	-	-	1	31.900,00	-	0
121	SAPU KEDUK/RAYUNG	BUAH	-	-	6	136.800,00	5	114.000,00	1	22.800,00
122	SAPU LAWALAWA	BUAH	-	-	2	39.000,00	2	39.000,00	-	0
123	SAPU LIDI	BUAH	1	7.500,00	4	30.000,00	3	22.500,00	2	15.000,00
124	SELANG SPIRAL	METER	-	-	4	134.800,00	4	134.800,00	-	0
125	SERBET - SERBET	BUAH	2	16.000,00	6	48.000,00	8	64.000,00	-	0
126	SERBET - SERBET HANDUK TOILET GANTUNG	BUAH	1	21.000,00	5	105.000,00	6	126.000,00	-	0

127	SIKAT KAMAR MANDI	BUAH	1	33.000,00	4	132.000,00	3	99.000,00	2	66.000,00
128	SNELHECTER - KERTAS (FOLIO)	BUAH	52	119.276,00	50	115.000,00	92	211.276,00	10	23.000,00
129	SNELHECTER - PLASTIK	BUAH	10	77.270,00	10	98.500,00	20	175.770,00	-	0
130	SPIDOL - BESAR WHITE BOARD	BUAH	4	36.581,00	3	26.760,00	5	45.501,00	2	17.840,00
131	SPIDOL - KECIL SNOWMAN	BUAH	4	6.720,00	6	10.080,00	5	8.400,00	5	8.400,00
132	STABILLO BOSS - STABILLO BOSS BESAR	BUAH	7	63.332,00	6	53.520,00	7	63.332,00	6	53.520,00
133	STEMPEL - DIGITAL	BUAH	-	-	1	68.200,00	1	68.200,00	-	0
134	STEMPEL - MANUAL	BUAH	-	-	2	63.800,00	2	63.800,00	-	0
135	STICKY NOTES	PACK	1	22.727,00	11	250.800,00	12	273.527,00	-	0
136	STIP (KARET PENGHAPUS) - STIP (KARET PENGHAPUS)	BUAH	2	8.120,00	4	16.240,00	1	4.060,00	5	20.300,00
137	STOP MAP - FOLIO	BUAH	62	56.408,00	668	608.550,00	705	642.208,00	25	22.750,00
138	STOP MAP - PLASTIK	BUAH	2	14.560,00	265	1.929.200,00	259	1.885.520,00	8	58.240,00
139	STOP MAP BUPATI FOIL EMAS	LEMBAR	-	-	25	136.500,00	25	136.500,00	-	0
140	STOPMAP BLOK WARNA BC BIASA	LEMBAR	125	648.750,00	250	1.297.500,00	285	1.479.150,00	90	467.100,00
141	TALI RAFIA 1 KG	ROL	-	-	2	35.800,00	2	35.800,00	-	0
142	TINTA - STEMPEL	BOTOL	5	55.000,00	5	55.000,00	7	77.000,00	3	33.000,00
143	TINTA REFFIL EPSON BLACK 003	BUAH	7	770.000,00	37	4.070.000,00	40	4.400.000,00	4	440.000,00
144	TIPP EX - TIPP-EX KERTAS (TIPP-EX PITA)	BUAH	1	13.500,00	10	135.000,00	9	121.500,00	2	27.000,00
145	USB FLASHDISK - KAPASITAS 16 GB	BUAH	5	682.000,00	9	1.168.500,00	11	1.500.400,00	3	350.100,00
146	USB FLASHDISK - KAPASITAS 32 GB	BUAH	6	900.000,00	-	-	4	600.000,00	2	300.000,00
147	USB KEYBOARD	BUAH	1	50.000,00	-	-	1	50.000,00	-	0
148	USB MOUSE	BUAH	7	518.700,00	8	592.800,00	12	889.200,00	3	222.300,00
<b>TOTAL</b>			<b>46.455</b>	<b>482.991.481,20</b>	<b>234.867</b>	<b>1.224.422.400,00</b>	<b>241.472</b>	<b>1.275.051.706,20</b>	<b>39.850</b>	<b>432.362.175,00</b>

ATASAN LANGSUNG  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  
**RETNO ARI ERLINA, SE, MM**  
Penata Tk. I III/d  
NIP. 19730301 200801 2 003

PENGURUS BARANG

  
**DEPI MAEMONA, A.Md**  
Pengatur II/c  
NIP. 19890824 202012 2 002

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PRKB DAN P3A  
KABUPATEN WONOGIRI







PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
Jl. Mayjend Sutoyo S. 26 Wonogiri Telp. (0273) 321017 Faks. (0273) 321017  
Email/Website : dinasppkdbanp3a@wonogirikab.go.id

REKAP HUTANG BELANJA PEGAWAI TAHUN 2023  
YANG DIBAYARKAN TAHUN 2024

OPD : DINAS PPKB DAN P3A KABUPATEN WONOGIRI

No	NOMOR REKENING BELANJA	NAMA REKENING BELANJA	JUMLAH (Rp)	DOKUMEN	KETERANGAN
1	2.14.2.14.14.01.2. 02.0001.5.1.01.01 .09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.968.666	SP2D No 0080/LS/2.14.14/202 4 Tanggal 10 Januari 2024	
2	2.14.2.14.14.01.2. 02.0001.5.1.01.02 .01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	80.157.000	SP2D No 0080/LS/2.14.14/202 4 Tanggal 10 Januari 2024	
	TOTAL		83.125.666		

Mengetahui  
Kepala Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri



PPK

EMILIA SUSANTI, SE  
NIP. 19720405 199603 2 005





REKAP HUTANG BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN 2023  
YANG DIBAYARKAN TAHUN 2024

OPD : DINAS PPKB DAN P3A KABUPATEN WONOGIRI

No	JENIS HUTANG	NAMA REKENING BELANJA	JUMLAH (Rp)	DOKUMEN	KETERANGAN
	Hutang Langganan Listrik (pasca bayar bukan token)	Belanja Listrik			
1		Dinas KB Dan Pemberdayaan	4.041.083	Kuitansi Pembayaran Listrik pemakaian/tagihan bulan desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
2		Gedung BKKBN Wonogiri	176.236	Kuitansi Pembayaran Listrik pemakaian/tagihan bulan desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
3		Griya Kencana, GOR	878.546	Kuitansi Pembayaran Listrik pemakaian/tagihan bulan desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
4		Kantor P2TP2A dan PPKS	97.688	Kuitansi Pembayaran Listrik pemakaian/tagihan bulan desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
	JUMLAH TOTAL		5.193.553		
	Hutang Langganan Air	Belanja Tagihan Air			

No	JENIS HUTANG	NAMA REKENING BELANJA	JUMLAH (Rp)	DOKUMEN	KETERANGAN
1		BKKBN	401.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
2		Gedung BKKBN	269.050	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
3		RD Puskesmas Wonogiri	53.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
		Kecamatan :	-		
4		Wonogiri	53.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
5		Selogiri	53.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
6		Ngadirojo	53.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
7		Nguntoronadi	-	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
8		Jatisrono	53.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
9		Jatiroto	100.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	

No	JENIS HUTANG	NAMA REKENING BELANJA	JUMLAH (Rp)	DOKUMEN	KETERANGAN
10		Jatipurno	50.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
11		Sidoharjo	52.500	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
12		Girimarto	53.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
13		Purwantoro	52.500	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
14		Slogohimo	53.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
15		Bulukerto	50.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
16		Puhpelem	50.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
17		Kismantoro	-	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
18		Wuryantoro	53.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
19		Manyaran	52.500	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	

No	JENIS HUTANG	NAMA REKENING BELANJA	JUMLAH (Rp)	DOKUMEN	KETERANGAN
20		Eromoko	-		
21		Pracimantoro	57.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
22		Baturetno	52.500	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
23		Batuwarno	53.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
24		Tirtomoyo	52.500	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
25		Giriwoyo	54.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
26		Giritontro	53.000	Kuitansi Pembayaran Air Pemakaian/Tagihan Bulan Desember 2023 dengan nota/bukti bayar di tahun 2024.	
27		Karangtengah	-		
28		Paranggupito	-		
		JUMLAH TOTAL	1.823.550		
	Hutang Langganan Telepon/Faksimile/Internet (pasca bayar bukan token)	Belanja Tagihan Telepon atau Belanja Kawat.Faksimili/Internet /TV Berlangganan			
1		BKKBN	34.634	Kuitansi pembayaran Telepon pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	

No	JENIS HUTANG	NAMA REKENING BELANJA	JUMLAH (Rp)	DOKUMEN	KETERANGAN
		JUMLAH TOTAL	34.634		
1	Hutang Langganan Telepon/Faksimile/Internet (pasca bayar bukan token)	BKKBN	729.550	Kuitansi pembayaran Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	
2		Gudang Alkon (Depi Maemona)	313.300	Kuitansi pembayaran Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	
		Kecamatan :	-		
3		Wonogiri	280.500	Kuitansi pembayaran Telepon/Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	
4		Selogiri	268.900	Kuitansi pembayaran Telepon/Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	
5		Ngadirojo	324.400	Kuitansi pembayaran Telepon/Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	
6		Nguntoronadi	324.400	Kuitansi pembayaran Telepon/Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	
7		Jatisrono	324.400	Kuitansi pembayaran Telepon/Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	

No	JENIS HUTANG	NAMA REKENING BELANJA	JUMLAH (Rp)	DOKUMEN	KETERANGAN
8		Jatiroto	350.000	Kuitansi pembayaran Telepon/Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	
9		Jatipurno	328.230	Kuitansi pembayaran Telepon/Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	
10		Sidoharjo	294.150	Kuitansi pembayaran Telepon/Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	
11		Purwantoro	330.450	Kuitansi pembayaran Telepon/Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	
12		Kismantoro	250.000	Kuitansi pembayaran Telepon/Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	
13		Wuryantoro	318.850	Kuitansi pembayaran Telepon/Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	
14		Manyaran	352.650	Kuitansi pembayaran Telepon/Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	
15		Eromoko	433.180	Kuitansi pembayaran Telepon/Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	
16		Pracimantoro	263.350	Kuitansi pembayaran Telepon/Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	

No	JENIS HUTANG	NAMA REKENING BELANJA	JUMLAH (Rp)	DOKUMEN	KETERANGAN
17		Batuwarno	380.000	Kuitansi pembayaran Telepon/Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	
18		Giriwayo	220.000	Kuitansi pembayaran Telepon/Faksimile/Internet pemakaian/ Tagihan bulan Desember 2023 dengan nota/ bukti bayar di tahun 2024	
	JUMLAH		6.086.310		
	total		13.138.047		

Kepala Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Wonogiri



PPK

EMILIA SUSANTI, SE  
NIP. 19720405 199603 2 005